
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI TERPADU PELABUHAN TUKAK SADAI DI KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Justiar Noer¹, Khasan Effendy², Ngadisah³, Sampara Lukman⁴
^{1,2,3,4}*Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)*
Email: justiar.noer@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tukak Sadai di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tukak Sadai masih belum optimal. Faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tukak Sadai adalah faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi.

Kata kunci: implementasi kebijakan, kawasan industri terpadu, pelabuhan.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of the development of the Integrated Industrial Estate of Tukak Sadai Port in South Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province and the factors that influence it. This research uses qualitative methods with data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and literature studies. Data analysis was performed using triangulation techniques. The results found that the implementation of the Tukak Sadai Port Integrated Industrial Estate development policy was not yet optimal. The inhibiting factors in the implementation of the Tukak Sadai Port Integrated Industrial Estate development policy are political, economic, social and technological factors.

Keywords: policy implementation, integrated industrial estate, port.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang tiga perempat wilayahnya berupa laut dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan pelayanan jasa di sektor lingkungan (*environmental services*) yang sangat besar, maka ekonomi kelautan merupakan keunggulan komparatif yang dapat ditransformasi menjadi keunggulan kompetitif dan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat

dan daerah melakukan sinergisitas sebagai upaya pembangunan ekonomi kelautan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (Lasabuda, 2013).

Kabupaten Bangka Selatan adalah salah satu dari tiga kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan potensi kekayaan alam yang berlimpah di bidang perkebunan dan hasil laut. Selain dari potensi alam, potensi lain yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Selatan adalah posisi geografisnya yang sangat strategis. Kabupaten Bangka Selatan berada di sekitar ALKI 1 (Alur Laut Kepulauan Indonesia 1) yang dilalui oleh jalur pelayaran internasional melewati Jakarta, Eropa, Singapura, Hongkong, Jepang dan Amerika Serikat. Posisi ini memiliki keunggulan geo-strategis yang mendatangkan peluang bagi wilayah Bangka Selatan untuk menangkap *global supply chain* guna kegiatan industri, perdagangan dan logistik.

Terdapat sejumlah potensi alam dan keunggulan geo-strategis yang dimiliki Kabupaten Bangka Selatan yang masih belum dimanfaatkan secara efektif guna menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Kabupaten Bangka Selatan terhadap daerah-daerah lainnya di Indonesia dibutuhkan percepatan pembangunan ekonomi yang memiliki sejumlah prasyarat utama yaitu; peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata dengan memperhatikan posisi geo-strategis regional dan global.

Konsep percepatan pembangunan yang didasari oleh potensi komparatif dan kompetitif Kabupaten Bangka Selatan tersebut membutuhkan dukungan sejumlah komponen seperti sistem logistik, infrastruktur kawasan, kebijakan dan peraturan, manajemen ruang dan wilayah serta sistem transportasi kawasan dengan pengembangan industri sebagai sektor utama penggerak perekonomian. Upaya pemerintah ini salah satunya direalisasikan dengan rencana pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Pelabuhan Tukak Sadai yang mampu menampung berbagai aktivitas industri guna meningkatkan perekonomian Kabupaten Bangka Selatan.

Kebijakan pengembangan kawasan industri ini menjadi salah satu strategi yang sesuai karena pengembangan industri dinilai dapat meningkatkan daya saing komoditas wilayah. Hasil produksi yang berdaya saing tentunya secara langsung akan mendatangkan keuntungan dan menjadi kapital yang dapat dipergunakan untuk membangun Kabupaten Bangka Selatan pada tingkat yang lebih lanjut.

Kawasan industri adalah suatu daerah yang didominasi oleh aktivitas industri yang mempunyai fasilitas kombinasi terdiri dari peralatan-peralatan pabrik, sarana penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (Dirdjojuwono, 2004). Pemerintah daerah perlu mengembangkan perekonomian dan investasi di daerahnya. Pengembangan kawasan industri penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dalam rangka menciptakan kesejahteraan utamanya melalui penyediaan lapangan kerja (Syahrudin, 2011). Melalui pertumbuhan ekonomi satu persen saja dapat menyerap tenaga kerja sekitar seratus ribu orang (Soeling, 2007).

Keberadaan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Pelabuhan Tukak Sadai dinilai potensial karena posisi Kabupaten Bangka Selatan yang dilalui oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), membuat kabupaten ini dilalui banyak kapal. Kapal-kapal yang berlayar merupakan kapal-kapal domestik maupun internasional. Pengembangan pelabuhan di Kabupaten Bangka Selatan juga dapat mendorong munculnya industri-industri penunjang maritim, selain itu dapat melahirkan industri angkutan laut dan industri pergudangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Pelabuhan Tukak Sadai di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung dan faktor-faktor penghambatnya.

B. KERANGKA TEORI

Kebijakan adalah keputusan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang atau pemimpin yang bijak dalam menjalankan kebijakan, sehingga implementasi kebijakan dapat diwujudkan sesuai kebutuhan dan perkembangan kondisi aktual lingkungan strategis yang dapat mendukung program-program pemerintahan dimasa yang akan datang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat (Suradinata, 2004).

Sebagai suatu konsep, kebijakan memiliki makna yang luas dan multi interpretasi. Anderson (dalam Wahab, 1998) memberi makna kebijakan sebagai perilaku aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Pengertian tersebut sangat luas dan bisa diartikan bermacam-macam, misal, sang aktor dapat berupa individu atau organisasi; dapat pemerintah maupun non-pemerintah. Demikian pula dengan istilah kegiatan tertentu bisa diartikan kegiatan administratif, politis, ekonomis dan lain-lain. Disamping itu, bentuk kegiatannya pun luas dan multi interpretasi misalnya dapat berupa pencapaian tujuan, perencanaan, program, dan

sebagainya. Dengan demikian studi kebijakan adalah studi tentang perilaku berbagai aktor dalam berbagai bidang kegiatan yang mempunyai relevansi dengan sang aktor.

Menurut Chander dan Plano dalam Keban (2004), kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chander dan Plano juga beranggapan bahwa “kebijakan publik merupakan intervensi yang terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok masyarakat tertentu agar dapat berperan demi kepentingan kelompok masyarakat agar dapat berperan dalam pembangunan maupun setiap tindakan yang dikerjakan oleh pemerintah. Dwidjowijoto (2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk menghantar masyarakat pada masa awal. Memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Berdasarkan berbagai sudut pandang terhadap pengertian kebijakan publik di atas, tampaklah bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam kewenangannya masing-masing.

Teori Implementasi Kebijakan Grindle (1980), menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan itu ditentukan oleh *Content* dan *Context* kebijakan. Menurut Grindle, isi kebijakan dan program merupakan factor penting dalam menentukan hasil dari inisiatif implementasi. Tapi seperti banyak contoh diatas menunjukkan, dan seperti yang terlihat pada gambar konten, kebijakan atau program sering merupakan factor penting karena potensi atau dampak nyata mungkin berada pada pengaturan social, politik, dan ekonomi yang diberikan. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan konteks atau lingkungan dimana tindakan administratif dicapai. Sering, tujuan actor akan berada dalam konflik langsung dengan satu sama lain dan hasil dari konflik ini dan akibatnya, siapa mendapat apa, akan ditentukan oleh strategi, sumber daya, dan posisi kekuasaan masing-masing actor yang terlibat. Apa yang diimplementasikan mungkin merupakan hasil dari kalkulasi politik kepentingan dan kelompok bersaing untuk sumber daya yang langka, response dari pejabat pelaksana, dan tindakan elit politik, semua berinteraksi dalam konteks kelembagaan yang diberikan. Analisis pelaksanaan program khusus untuk itu dapat diartikan menilai “daya kemampuan” actor, kepentingan mereka dan strategi untuk mencapainya, dan karakteristik

rezim dimana mereka berinteraksi. Hal ini pada gilirannya dapat mempermudah penilaian potensi untuk mencapai kebijakan dan tujuan program.

Menurut Grindle, dalam mencapai suatu tujuan para pejabat dihadapi dua masalah menyoroti interaksi lingkungan program dan administrasi program. Pertama, pejabat harus mengatasi masalah bagaimana untuk mencapai kepatuhan kebijakan. Mereka harus misalnya, memperoleh dukungan dari elite politik, dan kepatuhan instansi pelaksana, pembebanan birokrasi dengan pelaksanaan program-program dari elite politik tingkat yang lebih rendah, dan penerima manfaat. Mereka harus mengubah oposisi dari mereka yang mungkin dirugikan oleh program ke penerimaan mereka, dan mereka harus menjaga mereka yang dikecualikan, tetapi yang ingin memperoleh manfaat, dari menghancurkan mereka. Pemunculan seperti ini bias berarti kepatuhan tawar-menawar, akomodasi, dan konflik yang cukup besar. Namun, jika tujuan kebijakan secara keseluruhan untuk diwujudkan, sumber daya ditransaksikan guna memperoleh kepatuhan yang tidak boleh membahayakan dampak kekhususan program.

Sisi lain dari masalah kebijakan dan mencapai tujuan program dalam lingkungan tertentu dalam responsitas. Idealnya, institusi publik seperti birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan yang paling memadai bagi mereka untuk melayani mereka. Selain itu, tanpa responsitas yang cukup selama pelaksanaan, pejabat public yang kehilangan informasi untuk mengavaluasi pencapaian program dan dukungan dapat berate bahwa tuuan kebijakan tidak tercapai karena intervensi dari individu-individu atau kelompok yang sama, baik dalam rangka memperoleh spesifik jenis barang dan jasa dalam jumlah yang lebih besar atau untuk menghalangi pemenuhan program tertentu yang tidak dapat diterima oleh mereka sebagai menguntungkan.

C. METODE

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (Creswell, 2013; Moleong, 2007). Metode kualitatif memberikan gambaran dari hasil penelitian nantinya dalam pengembangan konsep teori penelitian yang digunakan (Creswell, 2013; Satori & Komaria, 2009; Bungin, 2011). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas: (1) Bupati Bangka selatan, (2) Sekertaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan (3) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (4) Bappeda Kabupaten Bangka Selatan (5) Kepala desa terkait (6) tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan secara induktif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dan dikembangkan menjadi sebuah asumsi dasar penelitian,

kemudian data-data lain terus dikumpulkan dan ditarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles & Huberman (1984). Data-data yang dikumpulkan dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification* sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Tukak Sadai

Teori yang digunakan oleh penulis dalam melihat implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Tukak Sadai adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merile S. Grindle. Grindle mengemukakan bahwa teori mengenai implementasi kebijakan, maka dalam keberhasilan sebuah proses implementasi program ataupun kebijakan terdapat dua variabel yaitu *content of Policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (lingkungan implementasi).

Implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Pelabuhan Tukak Sadai di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari :

- a. Pengembangan KIT Pelabuhan Tukak Sadai dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan kepentingan-kepentingan tersebut tentu memiliki pengaruh besar terhadap implementasinya. Dimana hal utamanya harus adanya sinergisitas antara kebijakan umum dan program pembangunan nasional serta daerah.
- b. KIT Pelabuhan Tukak Sadai ini telah memberikan manfaat *multiplier effect* bagi pertumbuhan kegiatan perekonomian sekitar seperti peningkatan dan penambahan infrastruktur, UMKM dan usaha masyarakat akan berkembang, hasil para nelayan dan perkebunan akan dibeli oleh industri, dan juga akan terbukanya lapangan pekerjaan.
- c. Perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua indikator, yaitu: indikator dampak dan indikator kinerja. Dimana dalam indikator dampak pengembangan KIT Pelabuhan Tukak Sadai ini memiliki biaya produksi atau anggaran yang dikeluarkan pemerintah lebih kecil karena pengelolaannya dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum yaitu PT Resun Bangka Abadi (RBA) sehingga pemerintah hanya membangun kawasan sekitar KIT Pelabuhan Tukak Sadai, namun perlunya pengawasan serta evaluasi yang jelas

sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pengelolaan kawasan. kemudian pada indikator kinerja dapat dilihat dari keterlibatan semua *stake holder* yang peran, perlu sinergi satu sama lain dalam pengembangan KIT Pelabuhan Tukak Sadai.

- d. Pengembangan KIT Pelabuhan Tukak Sadai sudah pada tahap II yang sudah bergerak pada pembangunan kawasan industri dengan berlandaskan pada RTRW Kabupaten Bangka Selatan dan hal ini di lihat dari kebijakan pemerintah sudah mendukung untuk mensupport pembangunan akan tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus di tambahkan untuk menambah landasan sebagai kekuatan hukum dengan menerbitkan perda kawasan khusus yang harus dibuat oleh pemerintah Bangka selatan sehingga bisa menjadi pedoman utama yang akan membatasi dari pembangunan kawasan sehingga peran serta OPD dapat lebih optimal.
- e. Dalam pelaksanaan program ini pemerintah daerah maupun pengelola kawasan (PT RBA) sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur dan juga mulai membangun fasilitas penunjang bagi kebutuhan KIT Tukak Sadai hal ini harus ditekankan kordinasi dan kolaborasi antara sesama OPD maupun antara Pemerintah daerah dengan Pengelola Kawasan sehingga tidak akan ada kesalahan atau kekurangan dalam mempersiapkan faktor penunjang bagi KIT Tukak Sadai.
- f. Pengembangan KIT Tukak Sadai belum sepenuhnya di dukung oleh para *stakeholder* yang akan membangun *interline* yaitu OPD Kabupaten Bangka Selatan di KIT Tukak Sadai karena untuk program para OPD tahun 2020 baru kan terfokus pada pembangunan *interline* kawasan Industri dimana hal ini yang tidak di temukan pada tahun-tahun sebelumnya. Bapeda selaku *leading sector* yang mengawal Pengembangan KIT Tukak Sadai ini akan membuat kelompok kerja (Pokja) untuk Pengembangan KIT Tukak Sadai agar pembangun kawasan ini lebih termonitor dan juga untuk pembangunan di wilayah *interline* ini dapat di sinergikan dan juga bisa di lakukan secara kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan juga masyarakat.
- g. Strategi para aktor khususnya Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam mengimplementasi kebijakan KIT Pelabuhan Tukak Sadai ini dipandang cukup, sebab mulai dari melakukan komunikasi intens dan berjenjang kepada pemerintah provinsi maupun pusat, hingga sosialisasi bertahap kepada masyarakat sebagai tujuan pembangunan itu sendiri telah membuahkan hasil dengan dikeluarkan surat

keputusan kementerian perindustrian untuk kawasan dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

- h. Pemerintah selaku insiator kebijakan telah melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat selaku objek dari pembangunan itu sendiri. Namun sosialisasi tidak cukup tanpa didukung dengan peningkatan sumber daya manusia.
- i. OPD Kabupaten Bangka Selatan selaku implementor telah menaati aturan. Namun upaya membuat berbagai kajian masih belum diwujudkan oleh beberapa OPD. Ketaatan terhadap regulasi perlu dilakukan dengan penuh kesadaran sehingga tidak menimbulkan keterlambatan pada tahapan implementasi kebijakan.

Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu: (1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan (2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sebagian besar telah menaati aturan. Akan tetapi upaya membuat berbagai kajian masih belum diwujudkan oleh beberapa OPD. Ketaatan terhadap regulasi masih dilakukan dengan penuh kesadaran sehingga menimbulkan keterlambatan pada tahapan implementasi kebijakan.

2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Tukak Sadai

Analisis faktor pendukung dan penghambat implementasi pengembangan KIT Tukak Sadai dilakukan dengan menggunakan Metode PEST. PEST merupakan singkatan dari Politik, Sosial, Ekonomi, dan Teknologi. Jadi dapat dikatakan bahwa Analisis PEST

adalah analisis atau alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari faktor-faktor Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi terhadap suatu program, maupun kebijakan. Pada dasarnya, analisis PEST membantu penulis menganalisis faktor pendukung dan penghambat dilihat dari perspektif Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi yang akan memengaruhi implementasi pengembangan KIT Pelabuhan Tukak Sadai. Analisis PEST Ini sering digunakan bersamaan dengan alat analisis lainnya seperti analisis SWOT dan Lima Kekuatan Porter untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang suatu situasi dan faktor-faktor internal dan eksternal terkait.

Faktor pertama dalam Analisis PEST adalah faktor Politik. Faktor ini akan menilai bagaimana peraturan pemerintah dan faktor hukum dalam memengaruhi lingkungan implementasi kebijakan. Masalah utama dalam faktor politik ini adalah stabilitas politik, pedoman pajak, ideologi negara, peraturan perdagangan, peraturan keselamatan, peraturan ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Dalam konteks Pengembangan KIT Pelabuhan Tukak Sadai ini, faktor politik yang menjadi daya dukung dalam implementasi kebijakan pengembangan KIT Pelabuhan Tukak Sadai ini ialah ada kebijakan yang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang RTRW yang menjadi landasan utama dari pembangunan Kawasan Industri ini. Lalu ditindak lanjuti dengan komunikasi serta mendorong menjadi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Bangka Belitung hal tersebut dikonkritkan didalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang RTRW Provinsi Bangka Belitung yang menjadikan KIT Pelabuhan Tukak Sadai sebagai kawasan strategis, kedua hal ini lah yang menjadi landasan utama dalam pembangunan KIT Pelabuhan Tukak Sadai. Akan tetapi masih terdapat faktor kendala yang menjadi hambatan dalam pengembangan KIT Pelabuhan Tukak Sadai ini.

Lambatnya respon dari pemerintah pusat untuk menetapkan KIT Pelabuhan Tukak Sadai menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) sehingga ini menjadi salah satu kendala dalam berbagi macam aspek mulai dari perizinan dalam pengelola kawasan, untuk support dari pembangunan infrastruktur dan juga untuk support dalam pembangunan wilayah. Selain itu, kendala yang kedua ialah belum adanya Peraturan Daerah Kabupaetn Bangka Selatan yang spesifik mengenai KIT Pelabuhan Tukak Sadai. Hal ini tentu sangat diperlukan untuk mempermudah dari kinerja para OPD karena sudah memiliki landasan hukum dan juga bisa mengatur penggunaan lahan dan dapat memberikan batasan yang pasti dalam pengembangan KIT Pelabuhan Tukak Sadai agar tidak menimbulkan dampak negatif yang akan muncul di kemudian hari. Selain itu dalam KIT Pelabuhan Tukak Sadai harus dapat pembentukan opini

publik diharapkan juga dapat mendorong *political will* dari berbagai lapisan atau tingkatan institusi. Terciptanya *political will* akan memudahkan relasi, koordinasi, dan timbal balik bagi proses implementasi kebijakan pengembangan KIT Pelabuhan Tukak Sadai. Hal tersebut karena dapat beriringan dengan pembentukan pola transaksi yang sinergis antar institusi. Bahwa institusi pengimplementasi berperan penting dalam proses implementasi kebijaksanaan terutama bagi Pemerintah pusat, Provinsi, maupun Daerah, sehingga *political will* akan mampu menjadi dasar terbentuknya komunikasi yang solid atau kuat dan sinergis antar institusi. maka hal tersebut akan memberikan pengaruh penting terhadap proses implementasi KIT Pelabuhan Tukak Sadai berjalan optimal.

Faktor kedua yaitu mengenai Ekonomi dimana faktor ini menjadi hal yang penting karena dalam teori kebijakan publik dari Grindle (1980) tidak menyebutkan ekonomi dalam dimensi yang ada, oleh sebabnya analisis ini sangat menunjang dari kebutuhan peneliti untuk melihat faktor ekonomi apa saja yang terjadi dalam implementasi pengembangan KIT Pelabuhan Tukak Sadai. Peneliti melihat ada 2 hal yang menjadi peluang KIT Pelabuhan Tukak Sadai ini untuk faktor ekonomi. Pertama, tersedianya lapangan pekerjaan baru terhadap masyarakat sekitar yang sebagian besar mata pencahariannya adalah nelayan dan pertambangan. Sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan dengan adanya aktivitas industri dimana saat ini dalam pengembangan kawasan sudah ada beberapa masyarakat yang terlibat menjadi pegawai walaupun masih dalam tahap pekerja kasar, dan juga pengelola kawasan sudah akan membentuk PPI (pusat pengelola Ikan) ini akan membantu para nelayan dalam penjualan hasil dari tangkapan nya agar dapat di jual ke luar daerah dengan harga yang masih tinggi hal seperti ini yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang baru dan juga mengoptimalkan potensi masyarakat yang ada. Potensi yang kedua ialah Pelabuhan Tukak Sadai terjadi peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan seperti tersedianya sistem jaringan komunikasi dan transportasi. Perkembangan wilayah disekitar KIT Pelabuhan Tukak Sadai ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir pantai khususnya dan umumnya masyarakatan Bangka selatan karena dapat meningkatkan potensi bagi pengembangan UMKM dan juga BUMDes yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor yang ketiga yaitu mengenai Sosial dalam hal ini peneliti mengamati potensi dari pengembangan KIT Pelabuhan Tukak Sadai ini tingginya antusias dari masyarakat. Masyarakat melihat ini sebagai hal yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

karena dampak dari pengembangan KIT Pelabuhan Tukak Sadai ini akan membuat wilayahnya menjadi maju, dan juga akan banyak fasilitas yang dibangun seperti sekolah, poliklinik atau rumah sakit dan juga infrastruktur lainnya, selain itu masyarakat melihat potensi untuk dapat menjadi pegawai pada kawasan atau pada perusahaan yang akan buka di dalam kawasan itu sendiri. Dan masyarakat juga percaya pembangunan kawasan ini tidak akan merusak lingkungan atau alam karena wilayah yang di gunakan tidak akan mengganggu mata pencaharian masyarakat yang sudah dilakukan sejak lama.

Akan tetapi hal yang menjadi hambatan ialah belum konkritnya Pemerintah Daerah dalam hal ini dinas ketenagakerjaan dalam mempersiapkan Balai Pendidikan dan Latihan yang akan menunjang kebutuhan akan pegawai yang memiliki keahlian tertentu yang dapat menjadi tenaga kerja pada KIT Pelabuhan Tukak Sadai sehingga ketika kawasan ini sudah masuk tahap selanjutnya dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Maka prioritas utama kepada masyarakat lokal yang sudah memiliki keahlian pada bidang tertentu yang sesuai dengan dunia industri khususnya industri yang ada di KIT Pelabuhan Tukak Sadai, hal ini jika ada perhatian penuh dari dinas tenaga kerja maka ini bisa menjadi suatu hal yang menjadi potensi dari peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dan faktor yang keempat yaitu mengenai teknologi, dimana teknologi disini bukan hanya berbicara software dan hardware saja, Teknologi adalah suatu pengetahuan, alat-alat, teknik dan kegiatan yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa teknologi meliputi seluruh proses transformasi yang terjadi dalam organisasi, menyangkut mesin-mesin yang digunakan, pendidikan dan keahlian anggota organisasi, serta prosedur kerja yang digunakan dalam pelaksanaan suatu organisasi. Dalam teknologi organisasi sebuah sistem terbuka, dan teknologi organisasi merupakan cerminan dari kondisi lingkungan organisasi dan juga jenis kegiatan internal yang terjadi dalam organisasi. Teknologi dalam organisasi memiliki peranan utama dalam mempelajari sifat-sifat dari teknologi suatu organisasi dan hubungan teknologi terhadap struktur organisasi.

Dalam analisis ini terdapat dua hambatan yang ada dalam teknologi ini yang peneliti temukan yang pertama mengenai sinergitas OPD terhadap implementasi pengembangan KIT Pelabuhan Tukak Sadai belum berjalan dengan baik. Rendahnya pemahaman OPD akibat dari belum rincinya kebijakan tersebut, membuat OPD masih menjalankan program rutin tahunan tanpa menganalisis kebermanfaatannya langsung terhadap pengembangan KIT Pelabuhan Tukak Sadai. Serta hambatan yang kedua ialah Rendahnya inovasi pemerintah dalam menciptakan peluang-peluang investasi yang guna memperkenalkan, memberikan pemahaman umum,

menanamkan citra (image), yang bermuara pada ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di KIT Pelabuhan Tukak Sadai.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tukak Sadai di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum optimal. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tukak Sadai di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari aspek politik, ekononmi, sosial, dan teknologi.

Secara Politik, respon pemerintah dalam menetapkan KIT Pelabuhan Tukak Sadai sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) lambat. Secara Ekonomi, meskipun nantinya akan terbuka lapangan kerja dan meningkatnya sarana prasana di sekitar kawasan, anggaran daerah masih belum mensupport sepenuhnya kebutuhan pengembangan KIT Tukak Sadai. Secara Sosial, tingginya antusias dari masyarakat, belum diiringi dengan langkah konkrit pemberdayaan masyarakat melalui program-program terarah dan terukur oleh OPD Kabupaten Bangka Selatan. Secara Teknologi, rendahnya inovasi guna menarik minat investor masih menjadi persoalan tersendiri. Belum adanya kebijakan yang jelas di Kabupaten Bangka Selatan yang mengatur secara khusus dan mendetail tentang KIT Pelabuhan Tukak Sadai memberi dampak ketidak pastian hukum bagi para pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2011). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dirdjojuwono, R. W. (2004). *Kawasan industri Indonesia: sebuah konsep perencanaan dan aplikasinya*. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.
- Dwidjowijoto, R. N. (2008). *Public Policy*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Keban, T. Y. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lasabuda, R. (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*, 1(2), 92-101.

- Milles, M. B., & Huberman, M. A. (1984). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Satori, D. A., & Komariah, A. (2009). Metodologi penelitian kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Soeling, P. D. (2007). Pertumbuhan Bisnis dan Tanggung jawab sosial perusahaan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, 15(1)*.
- Suradinata, E. (2004). *Pembaharuan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Syahrudin, S. (2011). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri. *Bisnis & Birokrasi Journal, 17(1)*.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.